

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG AKAD MUZĀRA‘AH
(Studi Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan)**



TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**TYA ANDIKA RIZALANTI
NPM : 1974134013**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG AKAD MUZĀRA‘AH
(Studi Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan)**

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Magister Hukum Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**TYA ANDIKA RIZALianti
NPM : 1974134013**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tya Andika Rizalianti

NPM : 1974134013

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 TENTANG AKAD MUZĀRA‘AH (Studi Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 18 Maret 2021

Yang Menyatakan



Tya Andika Rizalianti

NPM. 1974134013

ABSTRAK

Akad *muzāra'ah* merupakan salah satu bentuk upaya membangun kerjasama dengan prinsip tolong menolong untuk tujuan kesejahteraan masyarakat di desa Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram. Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) pada akad *muzāra'ah* digunakan sebagai landasan pedoman kepastian hukum dan menghindari pembatalan hukum sepihak. Fatwa yang digunakan pada akad *muzāra'ah* tersebut mempunyai kekuatan mengikat para pihak yang melakukan akad. Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang akad *muzāra'ah* akan dikaji menggunakan teori *maṣlahah*, teori *'urf* dan teori implementasi.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah* yang di Praktikan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Muzāra'ah* yang Terjadi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram. 3) Bagaimana Faktor-faktor Penghambat Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah* yang dipraktikan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Muzāra'ah* yang Terjadi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah* yang dipraktikan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikemukakan bahwa Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 pada praktik akad *muzāra'ah* di desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan ini belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 karena masih terdapat sengketa dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya ingkar janji dan sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad/perjanjian. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang akad *muzāra'ah* antara lain: 1) Adanya pihak yang tidak dapat menunaikan janji yang telah disepakati di awal akad/perjanjian. 2) Adanya pihak yang tidak melakukan keadilan dalam sistem bagi hasil akad *muzāra'ah*. 3) Adanya pihak yang tidak mampu dalam menunaikan akad sehingga menyebabkan ingkar janji dalam akad *muzāra'ah*. Praktik akad *muzāra'ah* di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram belum sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah meskipun dalam pelaksanaannya menganut prinsip tolong-menolong antara sesama manusia, akan tetapi masih terdapat sengketa dalam pelaksanaannya.



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

**Judul Tesis : ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NO. 85/DSN-MUI/XII/2012
TENTANG AKAD MUZARA'AH (Studi Desa Tanjung
Baru Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : Tya Andika Rizalianti

NPM : 1974134013

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup tesis pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.

Badar Lampung, 18 Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.H.
NIP. 196003291987031002

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
NIP. 197403072000121002



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

**Judul Tesis : ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NO. 85/DSN-MUI/XII/2012
TENTANG AKAD MUZARA'AH (Studi Desa Tanjung
Baru Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : Tya Andika Rizalianti

NPM : 1974134013

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan untuk Ujian Tertutup tesis pada tanggal yang dilaksanakan oleh
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Negeri Raden
Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji III : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

(Handwritten signatures of the examiners and secretary, each followed by a dotted line for a name stamp.)



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

**Judul Tesis : ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NO. 85/DSN-MUI/XII/2012
TENTANG AKAD MUZARA'AH (Studi Desa Tanjung
Baru Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama : Tya Andika Rizalianti
NPM : 1974134013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

**Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji III : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. (.....)



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 121 Labuhan Ratu - Bandar Lampung Telp. 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

**Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL NO. 85/DSN-MUI/XII/2012
TENTANG AKAD MUZARA'AH (Studi Desa Tanjung
Baru Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama : Tya Andika Rizalianti

NPM : 1974134013

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Telah diujikan dan Lulus dalam Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Negeri Raden Intan Lan**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag.

Sekretaris : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji III : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

**Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung**



**Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
NIP. 196010201988031005**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (Qs. Al-Ma’idah [5] : 1)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan tesis ini persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayahanda (Ridwan) dan ibundaku (Neli Sismita) yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun;
2. Adik-adikku tercinta Shinta Widuri, Ridli Alvando Prasyahtrio dan Muhammad Ridli Rivaldi serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Tya Andika Rizalianti lahir di Bandar Lampung pada tanggal 08 Juli 1997. Ia terlahir dari pasangan Bpk. Ridwan dan Ny. Neli Sismita orang tua yang bergitu luar biasa dan sangat berarti dalam hidup. Tya memiliki tiga orang adik yaitu Shinta Widuri, Ridli Alvando Prasyahtrio dan Muhammad Ridli Rivaldi yang sangat disayang dan cintai.

Pendidikan dimulai dari SDN I Way Lunik dan selesai pada tahun 2009, SMPN 11 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012, SMAN 6 Bandar Lampung jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan selesai pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah dimulai pada semester I Tahun Ajaran 2019.

Selama menempuh pendidikan di Pascasarjana S2 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tya Andika Rizalianti aktif di berbagai unit kegiatan mahasiswa, diantara unit kegiatan mahasiswa yang pernah diikuti yaitu Pik Sahabat, Puskima, Irfama, Bapinda dan RiseF.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṣā'	ṣ	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā'	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓā'	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, di tulis rangkap.

Contoh : شَخْصِيَّةٌ ditulis *syakhṣiyyah*.

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan dibaca h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti dengan kata sandang al) , kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : مَصْلَحَةٌ ditulis *maṣlaḥah*.

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ ditulis *al-Syarī'aty al-Islāmiyyah*

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat (fathah, kasrah, dan domah), ditulis *t*

Contoh : الشَّرِيعَةُ dibaca *syarī'aty*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masingmasing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : عَصَابَةٌ ditulis *aṣābah* ذَوِيّ ditulis *zawīl* فُرُوضٌ ditulis *furūd*

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

Contoh: شَيْطَانٌ ditulis *syaiṭan* قَوْلٌ ditulis *qaulu*

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof (')

Contoh : مُؤَنَّثٌ ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh : الْمَقَاصِدُ ditulis *al-Maqāṣid*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf L (el) diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

Contoh : الشَّرِيعَةُ ditulis *asy-syarī'ah*

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkain tersebut.

Contoh : الْمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةُ ditulis *Maqāṣid al-syarī'ah* atau *Maqāṣidu-syarī'ah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

1. Konsonan kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia dan terdapat pada kamus bahas Indonesia, seperti al-Qur'an, Hadis, mazhab, syari'at, lafaz, dll.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Misbah*, *al-Lu'lu Wal Marjan*, dll.
3. Nama pengarang yang menggunakan kata Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, seperti Quraish Shihab, dll.
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, dll.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzārah (Studi Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut Beliau.

Tesis ini ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari andil dan partisipasi sebagai pihak yang turut membantu. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan para mahasiswa;
4. Dr. Maimun S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
5. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

6. Drs. H. Asrori, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua PA Cilacap Jawa Tengah Kelas 1A yang telah memberikan ide mengenai judul yang dapat diteliti sehingga dapat terinspirasi dan dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah Program Pascasarjana S2 UIN Raden Intan Lampung;
8. Kedua orang tuaku, ayahanda (Ridwan) dan ibundaku (Neli Sismita) yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun;
9. Kepala Desa Tanjung baru dan masyarakatnya yang telah memberikan informasi mengenai implementasi akad *muzāra'ah* di desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan;
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Demikian penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulisan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri dan para pembaca umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Maret 2021
Penulis

Tya Andika Rizianti
NPM. 1974134013

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP.....	iv
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	v
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA.....	vi
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB -LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir	15
H. Pendekatan Penelitian	27
I. Metode Penelitian	27
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Fatwa	35
1. Pengertian Fatwa	35
2. Dasar Hukum Fatwa.....	37
3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	38
4. Metode Penerapan Hukum Islam	44
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) No. 85 Tahun 2012 Tentang Janji (Wa'd) dan Bisnis Syariah.....	51
6. Implementasi Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan	57
B. Tinjauan Umum Tentang Akad	58
1. Pengertian Akad	58
2. Dasar Hukum Akad	59
3. Rukun dan Syarat Akad	60
4. Macam-macam Akad	66
5. Asas Berakad Dalam Islam	67

6. Berakhirnya Akad	70
7. Hikmah Akad	71
C. Tinjauan Umum Tentang Muzāra‘ah	73
1. Pengertian Muzāra‘ah	72
2. Diisyaratkannya Muzāra‘ah	74
3. Transaksi Muzāra‘ah	74
4. Perbedaan Musaqoh, Muzāra‘ah dan Mukhabarah.....	75
5. Rukun Muzāra‘ah	77
6. Syarat-syarat Akad Muzāra‘ah	78
7. Dalil dan Hukum Akad Muzāra‘ah	80
8. Dasar-dasar Muzāra‘ah Menurut Para Ulama.....	83
9. Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap	85
10. Perbedaan Bagian dan Kerusakan Dalam Muzāra‘ah	86
11. Menyewakan Tanah	87
12. Zakat Muzāra‘ah	88
13. Berakhirnya Muzāra‘ah	88
14. Hikmah Muzāra‘ah	89

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Praktik Akad Muzāra‘ah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	92
B. Bentuk Akad Muzāra‘ah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan	103
C. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzāra‘ah di Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan	110

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzāra‘ah di Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan	112
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Pada Akad Muzāra‘ah	116
C. Pandangan Penulis Tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Pada Akad Muzāra‘ah di Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Rekomendasi.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Skema Alur Kerangka Pikir	26
Bagan 2.1 Skema Akad Muzāra‘ah	73
Bagan 3.1 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Desa Tanjung Baru.....	100
Bagan 3.2 Nama Perangkat Desa Tanjung Baru	102



DAFTAR TABEL

	Halaman
Bagan 3.1 Urutan Kepala Desa di Desa Tanjung Baru	93
Bagan 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	95
Bagan 3.3 Pertumbuhan Penduduk 2019-2020	95
Bagan 3.4 Tingkat Pendidikan	96
Bagan 3.5 Lokasi Pendidikan.....	96
Bagan 3.6 Struktur Mata Pencaharian.....	97
Bagan 3.7 Jenis Tanaman Pertanian.....	97
Bagan 3.8 Lembaga Pemerintahan.....	98
Bagan 3.9 Lembaga Kemasyarakatan	98
Bagan 3.10 Pembagian Wilayah	98
Bagan 3.11 Pemenuhan Air Bersih	99
Bagan 3.12 Data Tempat Ibadah.....	99
Bagan 3.13 Data Keagamaan Desa Tanjung Baru	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mempunyai kaidah untuk saling membantu di antara sesama manusia, membangun masyarakat dengan dasar prinsip tolong menolong dan prinsip persaudaraan. Dalam harta seseorang terdapat hak orang-orang yang lain, yaitu hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Akad *muzāra'ah* merupakan salah satu bentuk upaya membangun kerja sama dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat disertai prinsip tolong menolong dan persaudaraan. Di dalam akad *muzāra'ah* terdapat pihak pemilik lahan yang menyerahkan lahannya, sedangkan pihak lain dalam hal ini penggarap mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan ketika terjadinya akad.

Sejarah implementasi akad *muzāra'ah* sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah Saw, beliau mencontohkan praktik Akad *muzāra'ah* melalui penduduk Khaibar.

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya.” (Hadis Riwayat Muslim No. 3398)¹

Akad merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam, seorang muslim diperbolehkan melakukan akad dengan orang lain pada sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat Islam, tetapi Imam Ghazali mengingatkan

¹Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *MINHAJUL MUSLIM*, (Jakarta : Darul Haq, 2009), h. 677.

hendaknya manusia menjaga lisan, karena sesungguhnya ketika lisan berakad mungkin saja jiwa tidak dapat memenuhi akad tersebut, sehingga akad yang telah terucap tidak dapat dipenuhi dan hal tersebut merupakan salah satu sifat orang munafik yaitu apabila berakad dia tidak memenuhinya.² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012 yang membahas tentang akad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Fatwa tentang akad ini dikeluarkan pada 21 Desember 2012. Dewan Nasional Syariah menerbitkan fatwa No.85/DSN-MUI/XII/2012 dengan alasan, akad (*Wa'd*) sering muncul pada transaksi syariah, masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan operasional mengenai hukum menunaikan janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Agama Islam mengharuskan umatnya untuk memenuhi akad karena berkaitan dengan pahala dan dosa yang akan didapatkan. Jika ada orang yang berakad dan tidak bisa melaksanakan akad maka dia akan mendapat dosa. Imam al-Sarkhasi (ulama Hanafiah) Ibn Abidin (ulama Hanafiah), Syeh 'Ilyas, Ibn Rusyd (ulama Malikiah), Imam Abu Hanifah, Imam al-Syāfi'ī, Ibn 'Allan (ulama Syāfi'īyah), Ibn Hajar (ulama Syāfi'īyah), Imam al-Bahuti berpandangan bahwa menunaikan akad itu tidak wajib secara hukum. Menurut Imam Sa'id Ibn Umar, Samrah Ibn Jundub, Ibn Syubrumah Hanabilah), dan Imam Ibn Hazm (ulama Zhahiriah), Ibn al-Syath al-Maliki (Qasim Ibn Abd Allah), Muhammad Abd Allah Ibn al-'Arabi, Imam Ishaq Ibn Rahawaih, Imam Muhammad al-Ghazali, dan

²Abu Ḥamid al-Gazali, *Ulum ad-Din*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1986), Jilid 4, h. 141.

Imam Abu Bakr al-Razi al-Jashash menetapkan bahwa menunaikan janji adalah wajib secara hukum. Pendapat Ulama Maliki yang menetapkan bahwa hukum menunaikan janji adalah wajib secara hukum apabila janji dikaitkan dengan sesuatu hal (syarat) dan pihak yang diberi janji telah mulai melakukan hal yang dipersyaratkan tersebut. Pendapat tersebut kemudian dijadikan alasan mendorong DSN-MUI untuk menetapkan Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang akad yang terdapat pada transaksi keuangan dan bisnis syariah agar bisa dijadikan pedoman dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum tentang kewajiban dalam menunaikan akad yang diucapkan atau yang telah disepakati. Fatwa DSN-MUI No. 85/2012 menyatakan bahwa akad (*Wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak untuk melaksanakan suatu hal yang baik pada pihak lain yang hukumnya mengikat (wajib dilaksanakan) dan pihak yang diberi akad (*mau'ūd*) boleh memaksa pihak yang menyatakan akad (*wa'id*) untuk melaksanakan akadnya.

Akad *muzāra'ah* ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat).³ Dalam akad *muzāra'ah* biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.⁴ Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil, perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama dibidang pertanian, antara pemilik lahan dan penggarap, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik lahan untuk

³Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), h. 347

⁴Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Op.Cit.*, h. 677.

menggarap lahan pertaniannya dengan pembagian hasil berdasarkan hasil panen yang didapat, dibagi menurut perbandingan yang telah disepakati antara kedua belah pihak”.⁵ Akad bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu akad di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu akad, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai akad yang telah dibuat.⁶

Dalam kegiatan bermu’amalah, manusia telah diberi keleluasan untuk menjalankannya, akan tetapi keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah Swt, dalam *Q.S. An-Nisā’* [4] : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antara sesama. Di antara aturan tersebut adalah transaksi akad *muzāra’ah*. Akad *muzāra’ah* merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat di desa Tanjung Baru dalam

⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

⁶Brahmana Adhie, *Reformasi Pertanahan*, (Bandung: Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2002), h. 50.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999), h. 153.

mengelolah lahan. Akad *muzāra'ah* sering digunakan karena lahan dan bibit dalam akad *muzāra'ah* bersal dari pemilik lahan.⁸

Dalam akad *muzāra'ah* terdapat akad di antaranya akad perkiraan hasil panen, akad bagi hasil dan akad lainnya yang telah disepakati bersama.⁹ Hal ini kemudian menjadi pertimbangan karena adanya beberapa masalah yang diakibatkan oleh akad *muzāra'ah* mulai dari perkiraan hasil panen yang tidak pernah di informasikan kepada pemilik lahan, pembagian hasil panen yang tidak sesuai, dan permasalahan akad *muzāra'ah* lainnya yang tidak bisa ditunaikan. Ayat-ayat tentang akad meliputi *Q.S. Al-Mā'idah* [5] : 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Ayat lain yang menjelaskan mengenai akad terdapat dalam *Q.S. Al-Isrā'* [17] : 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Dan penuhilah akad; Sesungguhnya akad itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Dalil Al-Qur'an di atas merupakan ladasan hukum dalam menunaikan akad pada akad *muzāra'ah* karena telah adanya kesepakatan saat melakukan akad. Pada praktik akad *muzāra'ah* di desa Tanjung Baru terdapat permasalahan yang disebabkan adanya akad yang tidak dapat ditunaikan, seperti akad dalam perkiraan hasil panen, akad sistem bagi hasil

⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

⁹Mardalis, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 34.

yang tidak sesuai kesepakatan dan akad yang tidak bisa ditunaikan oleh pemilik atau penggarap.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu di adakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzāra‘ah” (Studi Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan).

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Munculnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012 karena akad sering digunakan dalam akad pada transaksi syariah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012 digunakan untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan hukum dalam menunaikan akad.
- c. Dalam akad *muzāra‘ah*, terdapat akad di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu kesepakatan bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai akad yang telah disepakati.

¹⁰Bapak Mad Supi, Kepala Desa Tanjung Baru, Wawancara Tanggal 7 Desember 2020.

- d. Menunaikan akad merupakan kewajiban yang harus ditunaikan karena telah adanya kesepakatan.
- e. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012.

2. Batasan Masalah

Tema atau pembahasan yang menjadi fokus dari kajian peneliti dalam penelitian ini adalah mengetahui implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012 pada akad *muzāra'ah*. Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012 yang digunakan dalam akad *muzāra'ah*.
- b. Akad *muzāra'ah* yang dilakukan di desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Analisis teori *maṣlaḥah*, teori *'urf* dan teori implementasi dalam Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah* yang dipraktikan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Muzāra'ah* yang Terjadi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram?
3. Bagaimana Faktor-faktor Penghambat Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah* yang dipraktikan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, antara lain:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah* yang dipraktikan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad *Muzāra'ah* yang Terjadi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah* yang dipraktikkan di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini menambah wawasan akan implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional dan menjadi pengalaman dalam mengakomodasi berbagai sudut pandang terkait suatu tema dan meramunya menjadi sebuah penelitian dengan harapan menjadi amal jariyah dikemudian hari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber data dan menambah khazanah keilmuan atau wawasan pengetahuan di bidang Hukum Islam, terutama Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah* yang dapat dijadikan landasan dalam menentukan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang

Akad Muzāra‘ah yang di dalamnya terdapat permasalahan akibat akad yang tidak ditunaikan.

- c. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan Studi Pascasarjana Program Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang membutuhkan sebagai referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dibidang pendidikan khususnya di bidang hukum ekonomi Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan terkait Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 sangatlah dinamis serta menambah wawasan intelektual bagi yang memerlukannya. Sampai saat ini tema ini senantiasa menarik dan terus tumbuh di dalam pengkajiannya. Adapun dalam kajian pustaka di dalam bentuk karya ilmiah dengan tema *Wa‘d* ditemukan pada penelitian setingkat tesis dan jurnal. Beberapa karya ilmiah yang turut membahas tema Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 antara lain:

1. Rafiq Yunus al Mashri dengan jurnalnya *al Wa'd al Mulzīm fī Mu'āmalāt al-Maṣārif al-Islāmiyyah, hal yajūzu anyakūna al-Wa'd Mulzīman Izā Kāna Badīlan Li'aqd Muḥarrām*, dari tulisannya menjelaskan bahwa apabila *Wa'd* merupakan pengganti dari akad yang diharamkan seperti menjual barang yang tidak dimiliki, maka hukum akadnya tidak mengikat, karena *Wa'd mulzīm* statusnya sama seperti akad.¹¹
2. Siti Solikhah, Tesis UIN Sunan Kalijaga tahun 2009 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'd Jual Beli Dalam al Ijārah Al Muntahiyah bi al Tamlik* (Studi fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002). Hasil penelitiannya menyebutkan *Al- Ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* bukan merupakan dua akad sekaligus dalam satu akad. *Al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* telah memenuhi asas-asas akad antara lain sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak dan akad ini tidak melanggar norma dan kesusilaan. Dari kategori akad yang tidak sah sampai akad yang sah, akad *Al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlik* adalah akad *nāfiḥ* karena belum terpenuhi syarat mengikatnya akad dan adanya *khiyār* dalam akad tersebut yaitu *khiyār* syarat.¹²
3. Muhamad Gozi, Tesis Fakultas Hukum Unair dengan judul *Akad Wa'd Al Murābahah* (Studi Kasus BRI Syari'ah). Hasil penelitiannya adalah

¹¹Rafiq Yunus al Mashri dengan jurnalnya *al Wa'd al Mulzīm fī Mu'āmalāt al-Maṣārif al-Islāmiyyah, hal yajūzu anyakūna al-Wa'd Mulzīman Izā Kāna Badīlan Li'aqd Muḥarrām*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 11 Tahun 2015, Fakultas Hukum dan Syariah IAIN Ambon. Diakses dari jurnal iainambon.ac.id

¹²Siti Solikhah, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'd Jual Beli Dalam al Ijārah Al Muntahiyah bi Al Tamlik* (Studi fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002), Tesis UIN Sunan Kalijaga tahun 2009. Diakses digilib.uin-suka.ac.id.

rukun, syarat dan asas dalam akad maupun *Wa'd* adalah sama, hal ini dikarenakan bahwa akad dan *Wa'd* mempunyai karakteristik yang sama, adanya pengikatan para pihak, namun dalam akad adanya hak dan kewajiban sedangkan dalam *Wa'd* belum atau tidak adanya hak dan kewajiban. *Wa'd* bisa digunakan dalam pembuatan akad antara lain, pada akad *Murābahah*, *Musyārahah*, *Muḍarābah*, *Ijārah* dan lain sebagainya. Dalam *Wa'd al-Murābahah* disini dimaksud adalah adanya ikatan antara nasabah dengan bank, yang membuat akad jual beli namun dibayar dengan sistem angsuran, maka dibuat *Wa'd* dahulu baru penurunan dana dibuat akad *Murābahah*nya. *Wa'd* dan akad sebaiknya dibuat dengan akta otentik supaya mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Peraturan perundang-undangan harus bisa mengakomodir dari permasalahan dalam perbankan syariah.¹³

4. Muhammad Nadrattuzaman Hosen, *Implementasi Wa'd*, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Al-Qalam Vol. 31 No. 1 (Januari - Juli) 2014. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa semua fuqaha sepakat bahwa akad merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan menunaikan sebuah akad merupakan kewajiban.¹⁴
5. Ina Indriastati, *Implementasi Fatwa DSN No. 85 Tahun 2012 Di BTPN Syariah Cabang Semarang*, Jurusan Mua'malah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dalam

¹³Muhamad Gozi, *Akad Wa'd Al Murābahah* (Studi Kasus BRI Syari'ah), Tesis Fakultas Hukum Unair. Diakses repository.unair.ac.id.

¹⁴Muhammad Nadrattuzaman Hosen, *Implementasi Wa'd*, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Al-Qalam Vol. 31 No. 1 (Januari - Juli) 2014. Diakses Jurnal Al-Qalam.

penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa¹⁵

6. Ninik Darmini dan Desrti Budi Nugraheni, laporan penelitian yang berjudul “Kajian Terhadap *Wa’d* (Akad) dalam Transaksi Perbankan Syariah Ditinjau Dari Hukum Akad di Indonesia”. Fokus penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis konsep *Wa’d* (akad) ditinjau dari hukum akad di Indonesia, jenis *Wa’d* (akad seperti apakah yang menimbulkan kewajiban bagi *wa’id* (orang yang berakad) untuk melaksanakan akadnya), serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi *mau’ūd* (pihak penerima akad) yang telah melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian ialah *Wa’d* (akad) dalam perspektif hukum perdata merupakan pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu yang ditunjukkan pada seseorang. Tidak semua akad mengikat seseorang untuk melaksanakannya. Akad yang mengikat seseorang untuk melaksanakannya merupakan akad yang mempunyai akibat hukum, yaitu hak bagi seseorang yang diakadkan/penerima akad (*mau’ūd*) dan menimbulkan kewajiban bagi orang yang berakad (*wa’id*), terutama apabila dalam akad itu telah dinyatakan diterima *mau’ūd* dengan memenuhi syarat yang diminta orang yang berakad (*wa’id*). Bentuk perlindungan hukum bagi orang yang diberi akad (*mau’ūd*) setelah memenuhi syarat yang diminta oleh orang yang berakad (*wa’id*) adalah

¹⁵Ina Indriastati, *Implementasi Fatwa DSN No. 85 Tahun 2012 Di BTPN Syariah Cabang Semarang*, Jurusan Mua’malah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Diakses ptipd.walisongo.ac.id

bahwa *mau'ūd* dapat menuntut apa yang telah diakadkan oleh *wa'id* apabila *wa'id* cidera akad. Perlindungan hukum bisa secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif berupa pencantuman akad-akad dalam kontrak, atau perlindungan hukum secara represif yaitu upaya hukum bagi litigasi maupun non litigasi berdasarkan perbuatan wanprestasi atau cidera akad.¹⁶

Berbagai penelitian telah dikemukakan di atas dalam kurun waktu 10 (tahun) terakhir, dimulai tahun 2010-2020 yang mengkaji dan membahas tentang *Wa'd*. Pembahasan terkait *Wa'd* atau akad disebutkan di atas tidak serta merta menutup kemungkinan untuk diadakannya penelitian baru atau lanjut terkait tema *Wa'd* dan fatwa *Wa'd*. Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah: Pertama, dalam penelitian *Wa'd* penulis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai landasan kepenulisan. Kedua, penelitian implementasi *Wa'd* digunakan sebagai pedoman seseorang menunaikan akad. Ketiga, dalam penelitian yang akan penulis bahas akan menghadirkan faktor-faktor penghambat implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dikaji menggunakan teori *maṣlaḥah*, teori *'urf* dan teori implementasi.

¹⁶Ninik Darmini dan Destri Budi Nugraheni, *Kajian Terhadap Wa'd (Akad) dalam Transaksi Perbankan Syariah Ditinjau dari Hukum Akad di Indonesia*, Laporan Penelitian, Yogyakarta : Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2016.

G. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *maṣlahah* teori '*urf*' dan teori implementasi yang digunakan sebagai kacamata dalam melihat dan menyinkronkan terkait Implementasi Fatwa Dewan Syariah No.85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah*. Adanya teori yang digunakan bisa dilakukan pencarian titik temu antara beberapa elemen tersebut.

a. Teori *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menghasilkan keuntungan serta menolak kerusakan. Sesuatu yang mengandung manfaat layak disebut *maṣlahah*. Oleh karena itu, *maṣlahah* memiliki dua sisi, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.¹⁷

Pembagian *maṣlahah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga: 1) *maṣlahah ḍarūriyyah*, 2) *maṣlahah Ḥājiyyah*, dan 3) *maṣlahah taḥsiniyyah*. Ketiganya memiliki kekuatan hukum yang bervariasi, sehingga dengan klasikasi ini memudahkan dalam pengategorian suatu permasalahan. *Maṣlahah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlahah* itu disebut juga dengan *munaṣib*. *Maṣlahah* dalam artian *munaṣib* terbagi menjadi tiga bagian: 1)

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), h.345.

maṣlaḥah al-mu'tabarah, 2) *maṣlaḥah al-mulgāh*, dan 3) *maṣlaḥah al-mursalah (islislah)*.¹⁸

Adanya perbedaan dikalangan ulama mengenai penggunaan *maṣlaḥah* al-mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maṣlaḥah* itu oleh *syar'ī* baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahwa diamalkannya *maṣlaḥah* itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan *syar'ī*. Beberapa pandangan para fuqaha tentang penggunaan *maṣlaḥah* sebagai metode ijtihad, fuqaha hanafi dan maliki menggunakan *maṣlaḥah*, fuqaha Syāfi'ī dan hambali tidak menggunakannya.¹⁹

Fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh imam maliki senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para fuqaha malikiyah tentang penggunaan pendekatan *maṣlaḥah* mursalah dalam metode kajian hukumnya, yaitu: 1) bahwa para sahabat Nabi Saw, memperlihatkan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf. 2) Bahwa selama *maṣlaḥah* berjalan dengan maksud *syar'ī* dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak *syar'ī* terhadap para mukalaf. 3) Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek

¹⁸*Ibid.*, h.235.

¹⁹*Ibid.*, h.358.

kemaslahatan, maka setiap mukalaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.²⁰

Maṣlahah digunakan sebagai upaya istinbat hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *maṣlahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *maṣlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut:

- 1) *Maṣlahah* tersebut bersifat rasional dan relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan dan dapat diterima oleh pemikiran rasional. Sebagai contoh disyariatkannya menunaikan akad setelah kesepakatan. Oleh karena itu, menunaikan akad merupakan suatu kewajiban.
- 2) *Maṣlahah* tersebut harus sesuai maksud *syar'ī* dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil.
- 3) Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*.²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maṣlahah mursalah* yang diterapkan dalam praktik akad *muzāra'ah* diharapkan mampu bermanfaat dan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram serta menolak kerusakan dari adanya ingkar janji dalam akad *muzāra'ah*. Penulis berpendapat bahwa janji yang telah disepkati di awal akad/perjanjian harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka akan

²⁰Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.113.

²¹*Ibid.*, h.114.

mendatangkan kemudahan bagi pihak-pihak yang melakukan akad memandang urgensi pentingnya melaksanakan janji.

b. Teori '*Urf*'

Teori '*urf*' digunakan dalam penelitian ini karena akad merupakan sebuah kebiasaan yang diucapkan seseorang. Pada umumnya akad melekat pada akad yang telah disepati wajib untuk ditunaikan.

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan '*urf*' sebagai, suatu yang telah dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana '*urf*' juga disebut sebagai adat istiadat.²²

Siyasah syariah didefinisikan sebagai kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang menghendaki kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama.²³

Dari keabsahannya dari pandangan syara '*urf*' terbagi menjadi dua: *al-urf al-ṣāhiḥ*, dan *al-urf al-fasid*. Adapun yang berkaitan dengan bahasan kami masuk dalam *al-urf al-ṣāhiḥ*.

al-urf al-ṣāhiḥ adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ* (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kemudahan bagi mereka.

²²Beni Ahmad Saebeni, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h. 190.

²³Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015), h. 4.

Sebuah adat dapat dikatakan '*urf*' dan dapat dijadikan sebuah pedoman hukum apabila:

- 1) Logis dan relafan dengan akal sehat yang tidak berbau maksiat.
- 2) Terulang ulang (kebiasaan).
- 3) Tidak bertentangan dengan *naş* maupun hadis.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori '*urf*' karena adanya kebiasaan yang dijadikan hukum oleh masyarakat desa Tanjung Baru dalam melakukan akad *Muzāra'ah*. Penulis menganalisis apakah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram tidak bertentangan dengan *naş*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kemudratan bagi mereka mengingat janji yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram menggunakan akad secara lisan. Hal ini disebabkan karena adanya rasa saling percaya para pihak yang melakukan akad.

c. Teori Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahas Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* atau yang sering dikenal (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan.

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi

²⁴ Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h. 61.

yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para *implementor* kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.²⁵

Menurut Agustino, “Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.²⁶

Secara sederhana implementasi bisa diartikan penerapan atau pelaksanaan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁷

Pendapat Cleaves yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”.

²⁵Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21

²⁶Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan VanHorn*, unja.ac.id, diakses 1 Agustus 2020.

²⁷Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, *Guru Professional Dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 7.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.²⁸

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu /pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁹

Menurut Mazmanian dan Sebastiar Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.³⁰

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ada beberapa teori implementasi di antaranya:

²⁸Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008), h. 187.

²⁹*Ibid.*, h. 68.

³⁰*Ibid.*, h. 65.

1) Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implelementasi suatu kebijakan, yaitu :

- a) Komunikasi;
- b) Sumberdaya;
- c) Disposisi; dan
- d) Struktur birokrasi.³¹

2) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

- a) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiologi kulturasi yang ada di level pelaksana kebijakan.

³¹Ase Satria, Definisi *Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan*, dalam Jurnal Kebijakan Publik Vol.4, diakses 1 Agustus 2020.

b) Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya.

d) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal paham persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e) Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.³²

Teori Implementasi menurut Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Implementasi oleh George C. Edward III yang diterapkan dalam praktik akad *muzāra'ah* diharapkan mampu menerapkan akad-akad yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Penulis menganalisis apakah akad *muzāra'ah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram

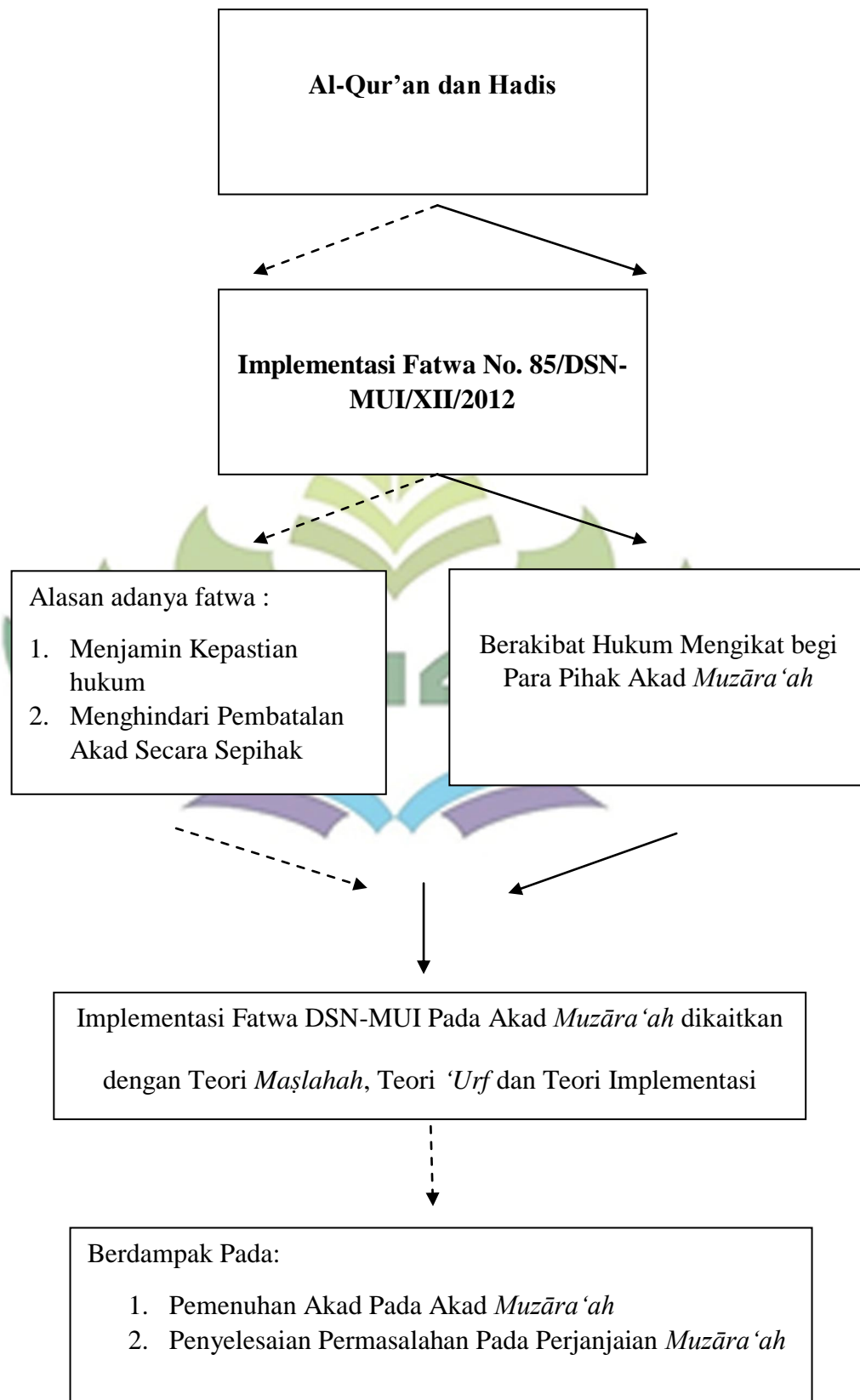
³²Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), h. 154.

sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012.

2. Kerangka Pikir

Al-Qur'an dan Hadis adalah landasan utama dalam berpijak seputar pembuatan suatu Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dapat digunakan sebagai landasan dalam sebuah akad. Fatwa Dewan Syariah Nasional hadir sebagai tambahan dalam akad dan menjadi landasan berpikir dan beristinbat mana kala ditemui permasalahan yang belum ada sebelumnya. Permasalahan yang belum terjawab atau belum final hukumnya dapat diteliti menggunakan kajian usul fiqh yang mengacu kepada asas-asas hukum Islam, agar ditemukan hukumnya yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah* digunakan sebagai ladasan pedoman kepastian hukum dan menghindari pembatalan akad secara sepihak. Fatwa yang digunakan pada akad *muzāra'ah* tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang melakukan akad. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah* yang dikaji menggunakan teori *maṣlaḥah*, teori *'urf* dan teori implementasi mempunyai dampak pemenuhan akad pada akad *muzāra'ah* dan penyelesaian permasalahan pada akad *muzāra'ah*.

Bagan 1.1. Skema Alur Kerangka Pikir



H. Pendekatan Penelitian

Metode pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan yuridis, filosofis, historis, dan ushul fiqh. Pada pendekatan yuridis dan ushul fiqh mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional atau lebih dikenal sebagai landasan dalam perjanjian Akad *muzāra'ah*. Dalam penelitian yang terjadi akan dianalisis dengan menggunakan kajian ilmu usul fiqh, baik metodologi dalam beristinbat maupun dalam teori *maṣlaḥah* teori *'urf* dan teori implementasi. Pendekatan filosofis berfungsi mengkaji esensi dari arti akad di dalam akad secara umum, dan pendekatan historis digunakan untuk melihat sejarah akad *muzāra'ah* yang telah dipraktikan oleh Rasulullah Saw pada penduduk Khaibar. Rasulullah Saw memberikan hak menggunakan tanah kepada penggarap pada akad *muzāra'ah*, dan kemudian dikaji dengan tema Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *muzāra'ah*. Melalui penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai implementasi fatwa tersebut.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali dikacaukan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.³³

³³Winda Nurlaili Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 13.

Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian memicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.³⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.³⁵

Kanneth D. Bailey menerangkan terkait istilah studi lapangan, bahwasannya istilah tersebut sering digunakan selaras dengan istilah studi etnografi (*ethnographic study* atau *ethnography*). Lawrence Neuman juga menjelaskan bahwa penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau penelitian *participant observation* dan merupakan bagian penelitian yang berorientasi kepada kasus yang terjadi di lapangan. Roice Singleton mengemukakan bahwa penelitian lapangan merupakan sebuah studi kepada masyarakat yang merupakan aspek sosial.

Menurut Bogdan di dalam penelitian dengan jenis kualitatif adalah digunakan sebagai prosedur di dalam penelitian yang dengannya akan memperoleh hasil berupa data secara penjelasan, yaitu catatan

³⁴Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

³⁵*Ibid.*, h. 9.

tertulis yang didapat dan diperoleh dari sumber yang menjadi objek penelitian, di dalam hal ini pendekatan terhadap setiap pelaku atau individu akan sangat membantu di dalam proses memperoleh data yang diharapkan.

Suharisni Arikuntoro mendefinisikan bahwa penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis, dan terstruktur di dalam mengambil dan menyajikan data yang bersumber dari fakta dan praktik yang terjadi di lapangan.

Penelitian lapangan adalah bertujuan meneliti kasus yang terjadi di lapangan demikian menurut Sayuti Ali. Kasus yang dimunculkan di dalam penelitian ini merupakan Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah*.

Raharjo menjelaskan teknik studi kasus merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami masing-masing individu yang merupakan pelaku atau pelaksana dalam kasus tersebut, dengan tujuan agar memperoleh keterangan yang detail dan komprehensif di dalam kasus yang dihadapi, baik problematiknya maupun untuk memperoleh sebuah solusi di dalam menyelesaikannya.

Penelitian ini dilakukan di lapangan atau pada responden di Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan. Alasannya, Peneliti menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami dan

mempelajari situasi. Studi dilakukan pada waktu interaksi berlangsung di tempat kejadian. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil-hasil yang diperoleh pada saat itu segera disusun saat itu pula.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.³⁶ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 sebagai upaya kepastian hukum pada akad *muzāra'ah*.

Analisis merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan memahami, menafsirkan, dan interpretasi data.

Berdasarkan penjelasan dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai, fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada kemudian

³⁶Kaelan M. S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h.58.

melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.

3. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁷ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diiperoleh dari tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu di Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).³⁸ Atau penelitian yang datanya diperoleh dari sumber-sumber bacaan.

³⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.

³⁸Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 76.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedi.³⁹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.⁴⁰ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik lahan dan penggarap di Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.⁴¹ Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Non-Probability Sampling, dengan teknik *purposive/judgmental* sampling

³⁹Winda Nurlaili Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 15.

⁴⁰Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 29.

⁴¹*Ibid.* h. 33.

yaitu dengan menetapkan kelompoknya.⁴² Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 5 pemilik lahan dan 5 penggarap lahan yang melakukan akad *muzāra'ah*.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁴³

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: Teknik wawancara berstruktur, yaitu di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti secara langsung di Desa Tanjung Baru Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.

6. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 sebagai upaya kepastian hukum pada akad *muzāra'ah* yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif, analisis ini bertujuan mengetahui Implementasi Fatwa

⁴²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 112.

⁴³*Ibid.*, h. 107.

Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 yang diterapkan pada akad *muzāra‘ah*. Tujuannya dapat dilihat dari kaidah fiqiiyah, yaitu agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang melakukan akad *muzāra‘ah*.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu “metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kadah-kaidah di lapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki”.⁴⁴ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan mengenai Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 pada akad *muzāra‘ah*.

Dalam mencari dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan tema yang penulis bahas, yaitu Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 85/DSN-MUI/XII/2012 dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Artinya, berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum yaitu pemahaman mengenai konsep akad dan Praktik akad *muzāra‘ah*, serta teori-teori yang ada bersifat umum yang berlaku secara umum dan meneliti persoalan-persoalan secara khusus dari segi dasar-dasar penelitian yang umum.

⁴⁴Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu “*Al-fatwā*” dengan bentuk jamak “*fatāwā*” yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas sebuah pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*.⁴⁵

Yusuf Qardhawi mendefinisikan fatwa secara syara’ adalah pendapat yang dapat menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan atau kolektif baik jelas identitasnya maupun tidak. Artinya, pendapat akan diberikan oleh seorang mufti meskipun pihak yang meminta jelas atau sebaliknya. Menurut As-Syatibi, fatwa secara terminologi adalah ketentuan tentang hukum syara’ yang bersifat tidak mengikat tetapi untuk diikuti.⁴⁶

Dari penjelasan di atas, Ma’ruf Amin mengemukakan bahwa terdapat dua hal penting dalam fatwa, yaitu Fatwa bersifat *responsive*. Fatwa merupakan jawaban hukum atau *legal opinion* yang dikeluarkan karena adanya pertanyaan atau permintaan (*based on demand*). Seorang

⁴⁵Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2011), h. 63.

⁴⁶Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibit Wat-Tasayyub*, terj. As’ad Yasin, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 19

pemberi fatwa (*Muftī*) dapat menolak memberikan fatwa atas pertanyaan tentang peristiwa yang belum terjadi.

Pada aspek kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum *legal opinion* yang tidak bersifat mengikuti. Orang yang meminta fatwa (*Mustaftī*), baik perseorangan, lembaga, atau masyarakat yang tidak harus mengikuti hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan karena fatwa tidaklah mengikat seperti putusan pengadilan dan adanya perbedaan pendapat oleh mufti yang ada disuatu tempat dengan mufti ditempat yang lain.⁴⁷

Dari pengertian-pengertian fatwa di atas terdapat syarat-syarat dalam pemberian fatwa, yaitu :

- 1) *Al-Iftā'* yaitu kegiatan dalam menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban yang telah diajukan.
- 2) *Mustaftī* yaitu individu atau kelompok masyarakat yang mengajukan pertanyaan atau permintaan fatwa.
- 3) *Muftī* yaitu orang yang memberikan jawaban pertanyaan atas permintaan atau orang yang berfatwa.
- 4) *Mustaftā Fīhī* yaitu masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang dinyatakan secara hukumnya.
- 5) Fatwa yaitu jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus, atau kejadian yang dipertanyakan.⁴⁸

⁴⁷*Ibid.*, h. 20.

⁴⁸*Ibid.*, h. 21.

2. Dasar Hukum Fatwa

Kedudukan fatwa dalam Islam telah ada pada masa Rasulullah Saw yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umat pada masa itu. Jawaban yang diberikan oleh Rasulullah Saw ada dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Jawaban yang langsung diberikan Allah Swt melalui Malaikat Jibril yang tercantum dalam Al-Qur'an.
- b. Jawaban yang berupa pendapat Nabi Muhammad Saw sendiri yang terkumpul hadis.⁴⁹

Adapun yang menjadi dasar hukum fatwa yang pertama sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qur'an :

- 1) *Q.S. Yūsuf* [12] : 43.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ
لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣

Artinya: Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya),
“Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang
gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai
(gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai
orang-orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil
mimpiku itu jika kamu dapat menakwil mimpi”.⁵⁰

⁴⁹Yeny Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2011), h. 71.

⁵⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999), h. 238.

Selain itu juga telah disebutkan di ayat lain tentang legalitas fatwa yang didasarkan atas pertanyaan dan permintaan atas suatu kejadian. Pertanyaan beserta jawaban yang berada dalam Al-Qur'an.

2) *Q.S. Aş-Şaffāt* [37] : 11.

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۖ ۱۱

Artinya: “Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): “Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu?” Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat”.⁵¹

3. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu lembaga yang dibentuk serta salah satu perangkat kerja MUI. Kehadiran Dewan Syariah Nasional adalah implementasi dari orientasi, fungsi dan tugas MUI. Pembentukan DSN-MUI cukup panjang, yang berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama komponen para ulama pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua Jawa Barat.⁵²

Dari lokakarya yang dilaksanakan menghasilkan dokumen penting yang terdiri atas 6 bab : pendahuluan, status hukum bunga, sistem perbankan bebas bunga, pengembangan bunga, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, rekomendasi, dan penutup. Dari hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih dalam pada Musyawarah

⁵¹*Ibid.*, h. 448.

⁵²Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, (Cet. III; Jakarta : Sekretariat DSN-MUI), h. 3.

Nasional ke-IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Setelah melalui pembahasan yang sangat panjang dengan berbagai pertimbangan disaat Musyawarah Nasional tersebut maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Dan kelompok kerja itu disebut dengan Tim Perbankan MUI.⁵³

Tim Perbankan MUI mempunyai tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani akta pendirian bank yang menggunakan sistem tanpa bunga pada tanggal 1 November 1991 ditandatangani akta pendirian bank yang menggunakan sistem tanpa bunga pertama yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ini berdiri atas dasar prakarsa MUI dalam pengembangan suatu konsep perbankan syariah Indonesia.⁵⁴

Atas langkah dan usaha Tim Perbankan MUI ini mendapatkan respon positif dari pihak legislatif dan eksekutif dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memuat aturan-aturan yang dimungkinkannya kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan prinsip syariah, yang disebut sistem bagi hasil.⁵⁵

⁵³*Ibid*, h. 4.

⁵⁴Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Sepertar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h.5.

⁵⁵Lihat Pasal 6 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan.

Sebagaimana terbentuknya Undang-Undang ini, langkah tindak lanjut yang dilakukan pemerintah pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1992, menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dimuat dalam Lembaran Negara : 1992/119 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 3505.⁵⁶

Melalui peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tersebut, Pasal 5 ayat (1) disebutkan : Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dijelaskan dalam ayat (2) menjelaskan pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil Konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah ulama Indonesia yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia.⁵⁷

Berdasarkan pada Pasal 5 PP Nomor 72 Tahun 1992 menjadi dasar formal regulasi awal bagi MUI untuk merumuskan dan membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun sebelum PP Nomor 72 Tahun 1992 ini dikeluarkan, terlebih dahulu MUI telah menetapkan Dewan

⁵⁶Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 5.

⁵⁷Lihat PP Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia, di antaranya adalah KH. Hasan Basri, KH. Ali Yafie, dan KH. Ibrahim Hosen.⁵⁸

Adanya legitimasi hukum yang mendasari pembentukan DSN-MUI, pada tanggal 29-30 Juli 1997, MUI menyelenggarakan Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah di Jakarta. Salah satu yang menjadi butir penting rekomendasinya adalah supaya MUI segera mendirikan lembaga yang menangani dan memberikan bimbingan, pedoman, dan fatwa mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan ekonomi syariah secara umum. Menindaklanjuti dari rekomendasi tersebut, pada tanggal 14 Oktober 1997, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN-MUI. Setelah 2 tahun Tim Pembentuk DSN-MUI bekerja, Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya Dewan Pimpinan MUI mengadakan agenda pada tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia Jakarta berkaitan dengan acara ta'aruf dengan Dewan Pengurus DSN-MUI kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus DSN-MUI yang dilantik oleh Menteri Agama saat itu yaitu Malik Fadjar.⁵⁹

Pembentukan DSN-MUI terbentuk dalam rangka merespon aspirasi umat Islam yang menginginkan fatwa, pedoman, dan bimbingan

⁵⁸Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, h. 6.

⁵⁹*Ibid*, h. 7-8.

ulama dibidang keuangan dan ekonomi, sehingga kegiatan merkadibidang ini telah sesuai dengan prinsip syariah. Sekaligus langkah efisien dan koordinatif para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi maupun keuangan. Berbagai problema dan kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama supaya memperoleh kesamaan pandangan dan penanganan oleh masingmasing DPS yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.⁶⁰

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai beberapa tugas dan fungsi diantaranya sebagai berikut :⁶¹

- a. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah, dan melakukan pengawasan aspek syariah atau produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- b. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- c. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- d. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- e. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Meskipun keberadaan DPS yang telah hadir terlebih dahulu dari DSN, tidaklah ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas

⁶⁰*Ibid*, h. 12.

⁶¹Lihat Keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) tetap akan memerlukan DPS dalam melakukan pengawasan pelaksanaan dan penerepan nilai syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Maka dari itu, DSN mempunyai kewenangan dalam rangka menjalankan tugas, diantaranya adalah :

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang dijadikan suatu landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- 6) Mengusulkan pada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁶²

⁶²*Ibid.*

Dalam menyelesaikan tugasnya, terdapat struktur pengurus DSN-MUI yang terbagi atas Pengurus Pleno dan Badan Pelaksanaan Harian (BPH). Pengurus Pleno ada 45 orang ulama dan praktisi ahli di berbagai bidang. Sedangkan jumlah BPH DSN saat ini adalah 25 orang termasuk wakil tetap Bank Indonesia dan 2 wakil tetap dari Kementerian Keuangan RI. Adapun tugas rutin yang harus dilakukan yaitu menggelar rapat secara rutin dengan melakukan formasi solusi terhadap beberapa persoalan atau membuat draft fatwa. BPH DSN terdiri atas beberapa Pokja, yaitu :

- a. Pokja Perbankan dan Pengadilan.
- b. Pokja Asuransi dan Bisnis.
- c. Pokja Program dan Pasar Modal.

Masing-masing Pokja tersebut terdiri dari 3-6 orang yang bertugas untuk melakukan formasi dan pendalaman masalah.

4. Metode Penerapan Hukum Islam

Pada dasarnya hukum telah dibuat oleh Allah secara lengkap dan menyeluruh. Namun, dalam implementasinya manusia dalam hal ini, mujtahid menetapkan mujtahid diberi kesempatan untuk menggali dan menetapkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Dalam menggali dan menetapkan hukum ada beberapa metode yang sudah disepakati oleh jumhur ulama, yaitu :

a. *Ijmā'*

Ijmā' adalah pendapat ulama terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan dalil syara'. Menurut A. Hanafi, *Ijmā'* dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) *Ijmā' Qouli*, yaitu dimana para mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid.
- 2) *Ijmā' Sukūti*, yaitu dimana para mujtahid diam, tidak mengatakan pendapatnya. Dan dalam diamnya bersifat menyetujui.⁶³

b. *Qiyās*

Secara bahasa *qiyās* adalah mengukur sesuatu atas lainnya atau mempersamakan. Menurut harfiah *qiyās* adalah menetapkan hukum atas perbuatan yang belum ada ketentuan/peraturannya, dengan berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.⁶⁴

c. *Istishāb*

Secara istilah *istishāb* adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena sesuatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah kedudukan dalil tersebut. Terdapat beberapa syarat dalam *istishāb* dengan pendapat yang berbeda-beda, yaitu :

⁶³A. Hanafie, *Ushul Fiqih*, (Cet. XI, Jakarta : Widjaja, 1989), h.125.

⁶⁴*Ibid*, h. 140.

- 1) Syāfi'īyyah, Hanabilah berpendapat bahwa hak-hak yang timbul tetap menjadi hak seseorang yang berhak terhadap hak-hak tersebut.
- 2) Hanafiah dan Malikiah membatasi *istiṣhāb* terdapat aspek yang menolak saja dan tidak terhadap aspek yang menarik menjadi alasan untuk menolak tetapi tidak untuk menetap.⁶⁵

d. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disinggung oleh dalil *syar'ī* untuk mengerjakan dan meninggalkannya. *Maṣlahah* yaitu apabila suatu perbuatan dikerjakan mendapat manfaat dan menghindari keburukan. Macam-macam *maṣlahah* ada tiga, yaitu :

- 1) *Maṣlahah Ḍarūriyyah* perkara-perkara yang menjadi tempat berdirinya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, menimbulkan kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Maṣlahah Ḥājiyyah* adalah semua bentuk perbuatan dan perilaku yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *Maṣlahah Ḍarūriyyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap terwujud, tetapi dapat menghindarkan suatu kesulitan serta dapat

⁶⁵Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 125.

menghilangkan kesempitan. *Hājiyyah* ini tidak rusak dan terancam.

- 3) *Maṣlahah Taḥsīniyyah* adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. *Taḥsīniyyah* juga masuk dalam konsep ibadah, adat, mua'malah, dan bidang uqubat. Misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan mendirikan salat.⁶⁶

e. *Talfīq*

Talfīq adalah mengerjakan sesuatu dengan cara seperti yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid, atau dengan kata lain mengambil satu rangkaian yang mempunyai kandungan beberapa rukun atau bagian dengan dua pendapat ulama atau lebih supaya sampai pada hakikat sesuatu yang tidak ada seorang pun mengatakannya. Atau mencampur adukkan perbuatan dalam satu rangkaian ibadah yang memiliki dua pendapat atau lebih, lalu pada tahap pelaksanaan implementasi dengan cara yang tak pernah dipilih dan diakui oleh imam madzhab manapun.⁶⁷ Pendapat-pendapat *Talfīq* yaitu :

- 1) Orang awam harus mengikuti madzhab tertentu, tidak boleh memilih suatu pendapat yang ringan karena tidak mempunyai

⁶⁶*Ibid*, h. 140.

⁶⁷Quraisy Shihab, *Qaidah-Qaidah Istimbath dan Ijtihad*, (Jakarta : Departemen Agama IAIN, 1986), h. 57.

kemampuan untuk memilih. Karena itu mereka belum boleh melakukan *Talfiq*.

- 2) Membolehkan *Talfiq* dengan syarat tidak akan menimbulkan pendapat yang bertentangan dengan salah satu madzhab yang diTalfiqan itu.
- 3) Membolehkan *Talfiq* tanpa syarat dengan maksud mencari yang ringan-ringan sesuai dengan kehendak dirinya.⁶⁸

f. Kaidah-Kaidah *Fiqhiyyah*

Al-Qawā'id Fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah *syar'īyyah* yang berfungsi untuk memudahkan seseorang *mujtahid* dalam mengeluarkan hukum terhadap suatu masalah dengan cara menggabungkan masalah yang serupa di bawah salah satu kaidah yang bisa dikaitkan. *Al-Qawā'id* adalah jamak dari kata *Qāi'dah* yang berarti sesuatu yang *universal* yang bisa mencakup beberapa bagian/partikular. Secara etimologi memiliki beberapa arti yaitu pokok, asas, ataupun tetap.⁶⁹

Menurut T.M Hasbi As-Shiddiqi mendeskripsikan Kaidah ushul fiqh adalah kaidah-kaidah yang bersifat kulliyah yang dipetik dari dalil-dalil kulliyah (Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pokok kaidah-kaidah *kulliyah* yang dapat disesuaikan dengan banyaknya *juzz'īyyah*) dan yang dimaksud syara' dalam meletakkan *mukallaf* di

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Edisi I, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 427.

⁶⁹Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Islam Perbankan*, (Jakarta : DIKTIS Kementerian Agama, 2012), h.1.

bawah beban *taklif* dan dari memahamkan rahasia *tasyri'* dan hikmahnya.

Mustafa Ahmad Al-Zarqo mendefinisikan Kaidah fiqh adalah kaidah ushul fiqhiyyah kulliyyah menggunakan redaksi-redaksi singkat yang bersifat undang-undang serta mencakup hukum hukum syara' umum tentang peristiwa-peristiwa yang masuk dalam ruang lingkungannya.⁷⁰

Terdapat beberapa klasifikasi kaidah-kaidah ushul fiqh, yaitu secara global kaidah ushul fiqh dibagi menjadi empat aspek sudut pandang :

1) Aspek sumber asal rujukan kaidah

Pada aspek ini dibagi menjadi dua macam kaidah yaitu :
Kiadah yang bersumber dari dalil naqli (Al-Qu'ran dan Hadis), dan Kaidah yang bersumber dari dalil *Aqli* atau hasil ijtihad ulama baik dari hasil ijtihad menggunakan dalil-dalil syara' yang mu'tabar atau lewat *Al-Istidlal Al-Qiyāsi* dan *Ta'lil Al-Ahkam*.

2) Aspek urgensi kaidah terhadap persoalan fiqh

Pada aspek kedua ini, dibagi menjadi lima macam kaidah yaitu:

- a) *Al-Qāi'dah Al-Asāsiyyah Al-Jāmi'ah*, yaitu kaidah *Jalb Al-Maṣāliḥ Wa Dar'u Al-Mafāsīd*,

⁷⁰Penjelasan Harun Zaini dan Mustafa Ahmad Al-Zarqa dalam buku abbas Arfan, *KaidahKaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan*, h.3.

- b) *Al-Qawā'id Al-Kulliyyah Al-Kubrā* yaitu kaidah yang merupakan cabang dari kaidah lima,
 - c) *Al-Qawā'id Al-Kulliyyah Al-Sugrā* yaitu dua puluh kaidah yang disebutkan As-Suyuti dalam bagian kedua *Al-Ashbah Wa Nazairnya*,
 - d) *Al-Qawā'id Al-Sugrā* yaitu dua puluh kaidah yang disebutkan As-Suyuthi dalam bagian ketiga kitab *Al-Ashbah Wa Nazairnya*,
 - e) *Al-Qawā'id Al-Juzz'iyyah* yaitu kaidah yang selain kaidah di atas baik dari hasil ijtihad ulama klasik dan *ijtihād* ulama kontemporer.⁷¹
- 3) Aspek jenis cakupan dalam bidang fiqh Pada aspek ketiga ini, dibagi menjadi dua macam :
- a) *Al-Qawā'id Al-'Ammah* yaitu kaidah-kaidah fiqh yang mencakup semua jenis dari bidang-bidang atau bab-bab fiqh,
 - b) *Al-Qawā'id Al-Khāṣṣah* yaitu kaidah-kaidah fiqh yang hanya mencakup jenis dari bidang atau sebagian kecil dari kaidah fiqh khusus dalam bidang muamalah.

4) Aspek pandangan madzhab

Pada aspek keempat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a) Kaidah fiqh yang disepakati para ulama baik lintas madzhab atau interen madzhab,

⁷¹Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008), h. 44.

b) Kaidah fiqh yang diperselisihkan para ulama.⁷²

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 85 Tahun 2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah

a. Pengertian *Wa'd* (Janji)

Wa'd adalah kesanggupan seseorang atau pihak tertentu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan tertentu. *Wa'd* juga berarti keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain.

Dalam analisis lain, *Wa'd* sebanding dengan janji atau pernyataan pihak tentang kesanggupan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan perbuatan tertentu (dalam hubungan kelembagaan antar organisasi sering dibuat perjanjian bersama/MoU). Sedangkan akad sepadan dengan perjanjian. Dengan demikian, *Wa'd* pada prinsipnya merupakan pernyataan kehendak secara sepihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan akad adalah kesepakatan (*toestemming*) para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (*ijab/offer*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”.
(*Q.S. Al-Mā'idah* [5] : 1)

⁷²*Ibid*, h. 45.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”. (*Q.S. Al-Isrā'* [17] : 34)

b. Macam-macam Janji (*Wa'd*)

Secara global janji itu ada dua macam, yakni:

1) Janji kepada Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

(*Q.S. Al-Mā'idah* [5] : 1)

Sebagian ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in, diantaranya adalah Ibnu Abbas dan Mujahid, juga sebagian ahli bahasa, di antaranya Az-Zujaj, mengatakan, “Yaitu perjanjian kepada Allah yang diambil dari umat ini agar mereka memenuhinya. Yaitu perkara-perkara yang Allah halalkan dan haramkan, juga perkara-perkara yang Allah wajibkan berupa shalat, puasa, zakat dan yang lainnya dari syariat Allah.”

Termasuk janji kepada Allah adalah nazar seseorang kepada-Nya. Misalnya seseorang mengatakan, “Jika Allah sembuhkan penyakit saya maka saya bernazar untuk berpuasa selama sepuluh hari.” Wajib baginya menunaikan nazar tersebut apabila telah sembuh dari penyakitnya.

Janji kepada Allah berupa kesaksian akan adanya Allah Yang Maha Esa, yang diberikan saat ditiupkan roh ke dalam jasad manusia, ketika manusia masih berada dalam kandungan ibunya. Sehubungan

dengan janji jenis yang pertama ini, Allah Swt berfirman dalam Al-Q.S. Al-A'rāf [7] : 172 :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٢

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".⁷³

Dalam bentuknya yang lain, sebagai orang Islam kita juga sudah berikrar atau berjanji dalam dua kalimat syahadat. Kita wajib menunaikan ikrar atau janji kita kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan yang mendalam.

2) Janji terhadap Diri Sendiri

Biasanya janji dalam hati, tetapi kadang-kadang ada juga yang diwujudkan dalam lisannya, atau bahkan secara tertulis, supaya dia tidak lupa pada janjinya itu. Janji berstatus sebagai nadzar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika sudah masuk wilayah nadzar, maka hukumnya adalah wajib. Misalnya berjanji untuk bangun setiap pagi menjelang subuh, berjanji untuk mengaji paling tidak sehari sekali, berjanji tidak akan bergaul dengan orang yang

⁷³Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 155.

berakhlak tercela. Berjanji untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima atau berhaji ke Baitullah, berjanji untuk melaksanakan tasyakuran jika ia lulus ujian. Contohnya: seorang yang sakit serius, kala itu dia mengucapkan “jika aku sembuh dari penyakitku, aku berpuasa tiga hari”. Hal itu merupakan janji manusia terhadap diri sendiri yang harus ditunaikan, yang dalam bahasa agama disebut dengan nadzar. Hal ini harus dilaksanakan karena Allah telah berfirman:

...وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ٢٩

Artinya: “...dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar nadzar mereka...” (Q.S. Al-Hajj [22] : 29).⁷⁴

Tentu saja nadzar yang harus dipenuhi adalah nadzar yang tidak melanggar dari syariat agama Islam. Tapi misalnya ada orang yang mengatakan, “kalau lulus ujian, saya akan potong tangan ibuku”. Itu haram dilaksanakan, karena manusia oleh Allah tidak diperkenankan untuk menyiksa diri sendiri ataupun orang lain.

3) Perjanjian sesama manusia

Janji ini adakalanya dilakukan secara lisan hanya dengan ucapan saja, tetapi adakalanya juga dilaksanakan secara tertulis. Janji secara lisan misalnya janji seseorang untuk mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, atau untuk fasilitas pendidikan umat Islam. Sebagian orang-orang tua kita dahulu berjanji hanya secara lisan, dan secara Islam pun sah. Sebagian dari model dahulu

⁷⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 334.

itu, kini menjadi masalah di kalangan sebagian umat Islam, ketika ahli waris dari *waqif* (orang yang mewakafkan) menuntut pengembalian tanah yang sudah diwakafkan itu. Begitu pula konsekuensi dari setiap perjanjian secara lisan. Dengan upaya pembinaan hukum dan umat Islam, masalah seperti itu tidak boleh terulang lagi, yakni jika ada yang mewakafkan tanah dan atau rumah, sudah harus dilaksanakan secara tertulis. Kata orang sudah harus ada berkas hitam putihnya, atas barang yang diwakafkan itu. Janji secara tertulis misalnya, janji seorang pegawai ketika diterima menjadi pegawai. Ia berjanji akan bekerja dengan baik, dan bersedia diberhentikan jika ia bekerja dengan tidak baik. Secara Islami, semua janji baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis wajib dipatuhi dan ditunaikan sebagaimana mestinya.

c. Kedudukan Janji Dalam Islam

Kita bisa mengetahui bahwa janji mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Tidak boleh kita seenaknya mengucap janji jika kita tidak merasa yakin bisa menepatinya. Tentang pentingnya menepati janji ini juga ada dalam *Q.S. An-Nahl* [16] : 91-92 :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٩٢

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan

yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya mengujimu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”.⁷⁵

Dari ayat di atas, kita bisa mengetahui bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk selalu menepati janji. Kalaupun misalnya kita melanggar janji tersebut dengan berbagai alasan yang tidak akan diketahui oleh orang lain, Allah Melihat apa yang kita lakukan. Allah Maha Mengetahui segala isi hati kita dan Dia akan meminta kita mempertanggungjawabkan perbuatan itu di akhirat kelak. Tentu kita harus melihat juga apakah isi perjanjian yang kita buat melanggar ajaran agama atau tidak.

Menurut M. Yunan Nasution, ada beberapa hukum memenuhi janji yaitu sebagai berikut:

- 1) Sunnah untuk memenuhinya, jika hal yang diperjanjikan tidak diperintahkan oleh agama dan juga tidak mengandung mudharat tertentu jika ditinggalkan, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Misalnya, seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi makan makanan pedas.
- 2) Sunnah untuk tidak memenuhinya, jika janji yang dia buat sudah tidak relevan dengan keadaan dan jika meninggalkan janji tersebut lebih besar manfaatnya. Misalnya ketika seseorang berjanji untuk tidak melanjutkan kuliah karena ingin berbisnis saja, namun orang tua lebih meridhai dia untuk kuliah. Jika demikian, dia harus

⁷⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 277.

membayar kafarat atas janji atau sumpah yang dia buat dengan berpuasa kafarat 3 hari berturut-turut.

- 3) Wajib untuk meninggalkan janjinya, yaitu ketika janji yang dia buat bertentangan dengan ajaran agama.

6. Implementasi *Wa'd* (Janji) Dalam Transaksi Keuangan

Dikutip dari Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN_MUI/XII/2012, terdapat 5 (lima) syarat agar *Wa'd* dinyatakan *mūlzim* (mengikat) sehingga wajib dipenuhi oleh pemberi janji, meliputi:

- a. Janji harus dinyatakan secara tertulis dalam akta atau kontrak perjanjian.
- b. Janji harus dikaitkan dengan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi atau dilaksanakan pemberi janji (janji bersyarat).
- c. Objek janji tidak bertentangan dengan syariah.
- d. Dalam konteks janji bersyarat, maka syarat sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan syariah.
- e. Penerima janji sudah memenuhi atau melaksanakan syarat sebagaimana nomor 2 (dua).

Terdapat sejumlah Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan janji, diantaranya:

- 1) Fatwa DSN No. 4 tentang *Murābahah*.
- 2) Fatwa DSN No. 5 tentang Jual Beli *Salam*.
- 3) Fatwa DSN No. 6 tentang Jual Beli *Istishnā'*.
- 4) Fatwa DSN No. 24 tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bit al-Tamlik*.

- 5) Fatwa DSN No. 45 tentang *Line Facility*.
- 6) Fatwa DSN No. 62 tentang Akad *Ju'ālah*, dan
- 7) Fatwa DSN No. 73 tentang *Musyārakah Mutanāqishah*.

B. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.⁷⁶ Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى جِهَةٍ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya : “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Adapun pencantuman kata-kata atau ucapan lisan “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).⁷⁷

⁷⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Amzah, 2010), 20.

⁷⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h.51

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷⁸ Sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Dengan landasan ini Ath-Thūsi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.

2. Dasar Hukum Akad

Pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an.⁷⁹ Dijelaskan dalam firman Allah Q.S. *Āli 'Imran* [3] : 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: “(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁸⁰

Dalam surah Q.S. *Al-Mā'idah* [5] : 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁸¹

⁷⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1, h. 15

⁷⁹Agus Rijal, *Op. Cit.*, h. 48.

⁸⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 56.

⁸¹Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), h. 447.

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah *Āli-Imrān* ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁸²

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.⁸³ Suatu perjanjian dalam hukum Islam sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat. Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut.⁸⁴

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *‘Āqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Secara umum, *‘āqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

⁸²Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, h. 19.

⁸³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, h. 114.

⁸⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke- 1, h. 180.

2) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli. Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad:

- a) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
- b) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.
- c) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
- d) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.

3) *Mauḍū 'al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

4) *Ṣighat al-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁶

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan

menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.⁸⁵

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al'aqd ialah:

- a) *Ṣigat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut takuti oleh orang lain.⁸⁶

b. Syarat-syarat Akad

Syarat- syarat akad ada empat macam, yaitu:

1) Syarat Terjadinya Akad.

Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam:

- a) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, aqid, objek

⁸⁵H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), h. 32

⁸⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h. 53

akad.⁸⁷ Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memilki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁸⁸
- b) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat

⁸⁷Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 151

⁸⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h.55

saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai, dan lain-lain).

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis.⁸⁹

3) Syarat Kelangsungan Akad

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

- a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauqūf* (ditangguhkan), bahkan menurut imam Syāfi'ī dan Ahmad akadnya batal.
- b) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauqūf*, tidak *nāfiʿ*.

4) Syarat Lazim

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (*lazim*).

Untuk mengikatnya suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*, h. 152.

adanya kesempatan *khiyār* (pilihan), yang memungkinkan di *fasakh* nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyār*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyār* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.⁹⁰

Menurut ulama Mazhab az-Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah batal. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, selain Mazhab az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanbali dan Maliki.⁹¹

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

⁹⁰*Ibid.*, h. 152.

⁹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), Cet Ke-2, h. 109.

a. Akad Sahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *nāfiʿ*, akad yang sempurna untuk dilaksanakan merupakan akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mauqūf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.⁹²

b. Akad yang Tidak Shahih

Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang *bātil* dan *fasid*.⁹³

Suatu akad dikatakan *bātil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Adapun akad *fasid* menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan

⁹²Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, h.56

⁹³*Ibid.*, h. 57

tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.

5. Asas Berakad Dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam Islam yaitu:

a. Asas Ketuhanan

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Ketika seorang manusia hendak bermua'malah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah.⁹⁴

b. Asas Kebebasan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermu'amalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk dengan menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang

⁹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet ke- 2, h. 92.

melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

c. Asas Persamaan atau Kesenjangan

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Seperti yang tercantum dalam *Q.S. An-Nahl* [16] :71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧١

Artinya : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?⁹⁵

d. Asas Keadilan

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah Swt yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah Swt tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.⁹⁶

e. Asas Kerelaan

⁹⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 274

⁹⁶Mardani, *Op.Cit.*, h. 94

Dalam *Q.S. An-Nisā'* [4] : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bātil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹⁷

Dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang *bātil*.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat tidak jujur dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.⁹⁸

g. Asas Tertulis

Disebutkan bahwa Allah Swt menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh

⁹⁷Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 83

⁹⁸*Ibid.*, h. 97

saksisaksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁹⁹

6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauqūf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa *khiyār*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewamenyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.¹⁰⁰

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

⁹⁹*Ibid.*, h. 98.

¹⁰⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 70

- 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
- 2) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
- 3) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹⁰¹

7. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'ī*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak miliki dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.¹⁰²

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h.59

¹⁰² Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet Ke-2, h. 106.

C. Tinjauan Umum Tentang Muzāra‘ah

1. Pengertian Muzāra‘ah

Pengertian *Muzāra‘ah* secara bahasa diartikan penanaman atau pengolahan. Adapun pengertian akad *muzāra‘ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen dan benih berasal dari pemilik.¹⁰³

Muzāra‘ah sering diidentikkan dengan *Mukhābarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, akad *muzāra‘ah* benih berasal dari pemilik lahan sedangkan akad *mukhābarah* benih berasal dari penggarap.

Akad Muzāra‘ah : benih dari pemilik lahan

Mukhābarah : benih dari penggarap¹⁰⁴

Secara umum, *Akad Muzāra‘ah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.¹⁰⁵

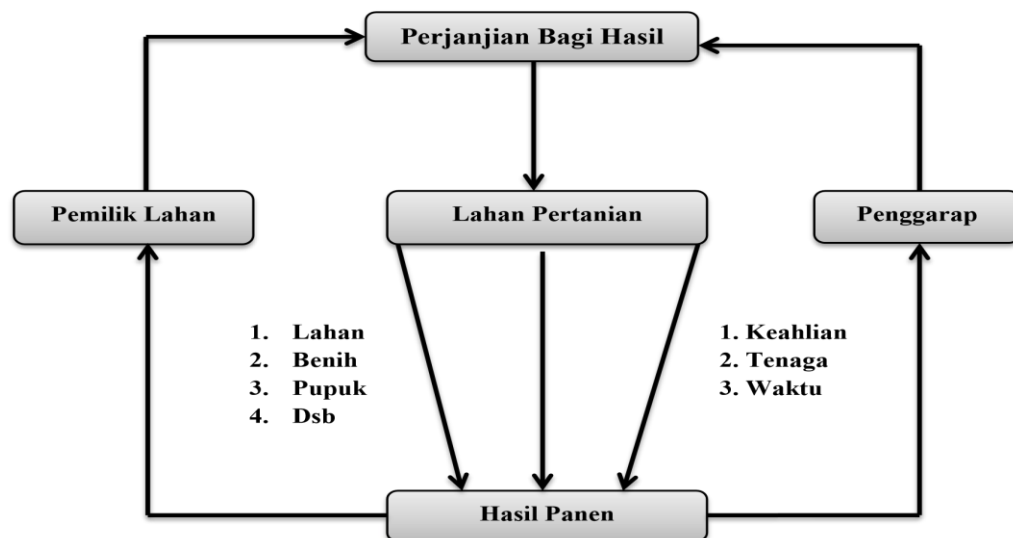
Bagan 2.1

Skema Akad *Muzāra‘ah*

¹⁰³Muhammad Az-Zuhaili, *AL-MU‘TAMAD FIQIH IMAM SYAFI‘I*, (Depok : Gema Insani, 2018) h. 185.

¹⁰⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqhu al-Islami wa Adililatuhu*, (Damascus: Darul-Fikr,1997), cetakan ke4, vol. VI, h. 468.

¹⁰⁵Muhammad Syafi‘I Antoni, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum* (Cet. I : Jakarta : Dar Al ittiba’, 1999), h. 141.



Sumber: Muhammad Syāfi'ī Antoni, *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*
 Penjelasan dari skema di atas adalah sebagai berikut:

Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih, dan pupuk untuk selanjutnya serahkan oleh pengelolahannya kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimilikinya oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan keduanya.

2. Diisyaratkannya Muzāra'ah

Diisyaratkan *Muzāra'ah* adalah berdasarkan *Ijmā'* Ulama dan *naş*.¹⁰⁶ Diantarnya ucapan Imam Ja'far al-Shadiq, "*Muzāra'ah* dapat dilakukan dengan sepertiga, seperempat, seperlima dan seterusnya". Juga ucapan beliau, "ketika menaklukkan Khaibar, Rasullullah Saw

¹⁰⁶Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (cet I; Jogjakarta: Kencana, 2011), h. 102.

menyerahkan (yakni pengelolaan tanah perkebunan Khaibar) kepada mereka dengan (pembagian hasil) separuh”. Penulis Al-Jawahir berkata, tidak ada keraguan dalam hal diisyaratkannya *akad muzāra‘ah* di kalangan ulama. *Naṣ-naṣ* tentang *muzāra‘ah* dan *musāqah* mencapai tingkat *mustafīd* atau *mutawātir*.¹⁰⁷

3. Transaksi Muzāra‘ah

Mayoritas fuqaha’ dari kalangan malikiyyah, Syāfi’iyyah, sebagian sahabat-sahabat ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi Akad *muzāra‘ah* adalah transaksi yang mengikat karena merupakan transaksi tukar-menukar.

Ada dua pendapat dari kalangan fuqaha’, diantaranya Imam Ahmad dan sebagian berpendapat golongan Syāfi’iyyah, menyatakan bahwa transaksi akad *muzāra‘ah* boleh (tidak mengikat) karena Rasulullah Saw tidak memberi batasan waktu kepada penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para Khalifah sepeninggal beliau.

Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya *muḍarābah*. Oleh karena itu masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka membuat hukum pembatalan transaksi sebelum berakhirnya masa yang disepakati. Jika transaksi dikeluarkan setelah keluar buahnya maka, maka hasilnya dibagi dua. Jika pekerjaan membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia tidak mendapat

¹⁰⁷JaWa’d, Mughniyah Agus, *Fiqh Imam Ja’far As-Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), h. 588.

apa-apa. Jika pemilik tanah membatalkan, ia harus memberi upah kerja kepada pekerja.

Penjelasan di atas, kesimpulannya adalah satu, yaitu tujuan utama yang berpendapat bahwa transaksi *muzāra'ah* bersifat mengikat adalah untuk menghindari kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu, ulama yang berpendapat bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan pembatasan waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat pertama lebih baik karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua belah pihak, dan dengan cara membatasi waktu tertentu, maka tujuan transaksi *muzāra'ah* dapat tercapai.¹⁰⁸

4. Perbedaan *Musāqah*, *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*

Muzāra'ah sering diidentikan dengan *musāqah* dan *Mukhābarah* akan tetapi diantaranya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

- a. *Musāqah* merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebut dalam akad.
- b. Sedangkan *muzāra'ah* dan *mukhābarah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu merupakan kerja sama antara pemilik lahan atau tanah dengan petani penggarap, namun yang dipersoalkan disini hanyalah bibit pertanian itu. *Muzāra'ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhābarah* bibitnya dari petani atau penggarap.

¹⁰⁸Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th. I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), h. 304-305.

Adapun persamaan dan perbedaan antara *musāqah*, *muzāra'ah*, dan *mukhābarah* yaitu, persamaannya adalah ketiga-tiganya merupakan *aqad* (perjanjian), sedangkan perbedaannya adalah di dalam *musāqah*, tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam *muzāra'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang menggarap). Sedangkan di dalam *mukhābarah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah.¹⁰⁹

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ada perbedaan antara *musāqah* dengan *muzāra'ah* antara lain adalah: 1) Jika salah satu pihak dalam akad *musāqah* tidak mau melaksanakan hal-hal yang telah disetujui dalam akad, maka yang bersangkutan boleh dipaksa untuk melaksanakan kesepakatan itu. Berbeda dengan akad *muzāra'ah*, bahwa jika pemilik benih tidak mau kerjasama dalam menuaikan benih maka ia tidak boleh dipaksa. Menurut jumhur ulama, akad *musāqah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak. Berbeda dengan *muzāra'ah* yang sifatnya baru mengikat jika benih sudah disemaikan, apabila benih belum disemaikan, maka pemilik boleh saja untuk membatalkan perjanjian itu. 2) Menurut Hanafiyah penentuan waktu dalam *musāqah* itu bukanlah salah satu syarat, penentuan lamanya akad itu berlangsung disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam akad *muzāra'ah* itu

¹⁰⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204.

dalam penentuan waktu, ada dua pendapat. Menurut Hanafi; pertama disyaratkannya tenggang waktu, dan kedua tidak disyaratkan. 3) Apabila tenggang waktu yang disetujui dalam akad *musāqah* berakhir, akad dapat terus dilanjutkan tanpa ada imbalan terhadap petani penggarap. Sedangkan dalam akad al-*Muzāra'ah* bila tenggang waktu telah habis dan tanaman belum juga berbuah (dipanen), maka petani penggarap melanjutkan pekerjaannya dengan syarat ia berhak menerima upah dari hasil bumi yang akan dipetik.¹¹⁰

5. Rukun Muzāra'ah

- a. *‘Āqidain* (orang yang bertransaksi) yaitu dalam hal ini adalah pemilik lahan dan pekerja atau petani penggarap.
- b. Objek transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati dalam akad *muzāra'ah*, meliputi tanaman pertanian, hasil pertanian, dan bagian masing-masing.
- c. *Ṣigat*. Akad *muzāra'ah* dianggap sah dengan semua lafal yang menunjukkan arti yang dimaksud akad.¹¹¹

6. Syarat-syarat Akad Muzāra'ah

Adapun syarat-syarat *muzāra'ah*, menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: Keduanya harus baligh dan berakal.

¹¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1, h. 1.

¹¹¹ Muhammad Abdullah al-Thayyar, Th. I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mahzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009), h. 299.

b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut :

1) Menurut adat dikalangan para petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

2) Batas-batas tanah itu jelas.

3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila diisyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

d. Syarat-syarat yang menyangkut hasil dengan panen sebagai berikut:

1) Pembagian hasil panen terhadap masing-masing pihak harus jelas.

2) Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

3) Pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh

hasil panen jauh di bawah itu dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzāra'ah* mengandung makna akad *Ijārah* (sewah-menyewah dan upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuannya jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat setempat.
- f. Syarat yang menyangkut kehalalan barang atau objek Akad *muzāra'ah* itu sendiri. Dalam hal ini kedua belah pihak yaitu pemilik lahan ataupun penggarap haruslah memperhatikan dengan jelas halal atau tidaknya objek yang mereka harus olah, agar usaha tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam.

Jumhur ulama yang membolehkan *muzāra'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.¹¹²

7. Dalil dan Hukum Muzāra'ah

Dalam *Q.S. Al-Mā'idah* [5]: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.¹¹³

¹¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1, h. 1.

¹¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Log., Cit.*, h. 106.

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga saling kepercayaan satu sama lain.

Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *aufū*, sebagaimana pada ayat di atas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *bil-‘uqūd* adalah jamak dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan berpisah dengannya. Perintah ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyalahkannya.

Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan atas kepentingan perorangan.¹¹⁴ Dalam *Q.S. Al-Isrā'* [17]: 34.

¹¹⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), h. 6-7.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا ﴿٢٥﴾

Artinya: dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya.¹¹⁵

Dari penjelasan ayat di atas adalah setiap setiap perjanjian harus pertanggung jawabannya yaitu wajib menepatinya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dari Abu Abbas ra. Menyatakan:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَفَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹¹⁶

Artinya: “Dari Rafi’ bin Khadij berkata: Dahulu Kami adalah orang Anshar yang paling banyak kebunnya, dimana kami menyewakan tanah dengan ketentuan bahwa kami memperoleh bagian yang ini dan penggarap memperoleh bagian yang itu. Maka terkadang pohon yang satu berbuah, sedangkan pohon lainnya tidak berbuah, kemudian kami dilarang melakukan hal itu. (H.R. Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan tentang boleh atau tidaknya melakukan *muzāra’ah* karena memang kejadian-kejadian dimasa dahulu, mereka menyewakan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari tanah yang subur inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw, karena akan merugikan salah satu pihak. Abdullah Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata :

¹¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Alwaah, 1989), h. 285.

¹¹⁶Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. III, No. 2722, h. 191.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹¹⁷

Artinya : Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* “Bahwasannya Rasulullah Saw memperkerjakan penduduk Khaibar dengan pembagian hasil setengah (lima puluh persen) dari buah atau hasil panen. (H.R. Muslim)

Dari Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw juga pernah melakukan *Muzāra'ah* (kerja sama dibidang pertanian) yang hasilnya dibagi setiap panennya sesuai kesepakatan awal.

Muzāra'ah adalah sesuatu yang diisyaratkan. *Muzāra'ah* termasuk bentuk tolong menolong secara kooperatif antara pekerja/penggarap dan pemilik tanah. hal ini karena kadang-kadang orang yang memiliki tanah tidak mampu menggarapnya sendiri karena lemah, area tanah luas, atau banyaknya tanaman. Dipihak lain penggarap mampu mengerjakannya dengan tenaga dan pengalaman. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi. Islam mengisyariatkan hal itu karena bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

8. Dasar-dasar *Muzāra'ah* Menurut Para Ulama

Dasar diisyaratkan *Muzāra'ah* adalah Hadis Rasulullah Saw. Ada beberapa Hadis shahih mengenai hal ini, diantaranya adalah Hadis dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu*, ia berkata :

¹¹⁷Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II, No. 2467, h. 824.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹¹⁸

Artinya : Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhu* “Bahwasannya Rasulullah Saw memperkerjakan penduduk Khaibar dengan pembagian hasil setengah (lima puluh persen) dari buah atau hasil panen. (H.R. Muslim)

Dari Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya. Kemudian pembagiannya sepertiga (1/3) atau seperempat (1/4).

Imam Malik berpendapat diisyaratkannya *Muzāra'ah* berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Saw jika tanah dalam *Muzāra'ah* didominasi kurma, yakni kurma lebih banyak dari tanaman lainnya, seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma atau lebih sedikit lagi.

Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa akad *Muzāra'ah* tidak diisyaratkan berdasarkan Hadis yang bersumber dari Rafi' Ibnu Khadij. Namun, sebagian pembesar ulama Syāfi'īyyah, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir, dan Al-Khathabi memperbolehkannya. Mereka menyatakan bahwa dibolehkan dan telah dipraktikkan oleh kaum muslimin diberbagai negeri dan tidak seorang pun yang membatalkannya.

Pendapat yang rajah (*valid*) diisyaratkan *Muzāra'ah* berdasarkan Hadis-hadis shahih yang menjelaskan persyariatannya yang telah mencapai status *Ijmā'*. Adapun Hadis Rafi' Ibnu Khadij

¹¹⁸Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. II, No. 2467, h. 824.

Radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah Saw melarang *Akad Muzāra'ah* telah ditolak oleh Zaid ibnu Tsabit *Radhiallahu'anhu* juga menolak Hadist Rafi' Ibnu Khadij, ia berkata “sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam*, tidak mengharamkan *Muzāra'ah*, tetapi memerintahkn agar manusia mempunyai rasa kasih sayang satu sama lain dengan sabdanya :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

Artinya : “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya.” (Hadis Riwayat Muslim No. 3398)¹¹⁹

Dari Hadis di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang mempunyai tanah yang luas maka sebaiknya berikan kepada seseorang untuk menggarapnya dengan imbalan setiap panen si penggarap berhak mendapatkan separuh hasil pertanian atas apa yang ia kerjakan.

Ibnu Thaimiyyah berpendapat bahwa maksud Rasulullah Saw melarang kerja sama menyewakan tanah dalam arti umum adalah jika pemilik tanah mensyaratkan ia sendiri yang membiayai keseluruhannya (karena maksud *Ijārah* pada sesuatu yang belum ada). Islam memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk melakukan transaksi *muzāra'ah*. Salah satu terdapat dalam riwayat Jabir *Radhiyallahu'anhu* bahwa Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سَرَقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ

¹¹⁹Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *MINHAJUL MUSLIM*, (Jakarta : Darul Haq, 2009), h. 677.

مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹²⁰

Artinya: Dari Jabir *Radhiyallahu'anhu* berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya (H.R. Muslim).

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang dilarang melakukan suatu kerja tanpa sebuah akad antara pemilik tanah dan penggarap. Hal ini bermaksud agar tidak satu pun pihak yang dirugikan atas kerjasama tersebut.

9. Kewajiban Pemilik Lahan dan Penggarap

Penggarap wajib mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan untuk kebaikan buah dan peningkatan produksi setiap tahunnya, seperti menyirami, mengola lahan, menjaga dan sebagainya.

Pemilik tanah atau lahan memiliki kewajiban mengerjakan sesuatu untuk kebaikan tanaman, membuat pagar, membuat saluran pengairan dari dan lain sebagainya.

Sebagian fuqaha' menyatakan yang juga menjadi pendapat hanabilah, bahwa benih menjadi tanggung jawab pemilik tanah karena keduanya berserikat untuk mengembangkannya, maka modal harus dari salah satu pihak, seperti *muḍarābah*. Ulama lain berpendapat tidak diisyaratkan demikian. Boleh saja pekerja yang memberikan benihnya. Demikian ini pendapat Umar Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Pendapat ini

¹²⁰ *Ibid*, Juz. III, No. 1552, h. 1188.

juga didukung oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Al-Qayyim. Mereka berargumentasi bahwa dasar *muzāra'ah* adalah tanah Khaibar, sedangkan Rasulullah Saw tidak menyebutkan bahwa benihnya menjadi tanggung jawab kaum muslimin.

10. Perbedaan Bagian dan Kerusakan Dalam Muzāra'ah

Jika kedua belah pihak berselisih mengenai bagian pekerja, pendapat yang dapat dipegang adalah ucapan pekerja jika menuntut sesuatu yang layak baginya karena mempunyai posisi yang kuat dalam melaksanakan *Muzāra'ah*. Imam Syāfi'ī menyatakan kedua harus bersumpah. Adapun Hanabilah berpendapat bahwa yang dipegang ucapan adalah pemilik tanah karena ia yang mengingkari. Hal ini berdasarkan Hadis :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) ¹²¹

Artinya : Dari Ibnu Abbas *Radhiallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah Saw bahwasannya beliau bersabda: Seandainya orang-orang selalu diberi (dikabulkan) dengan dakwaan mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta orang lain, namun bagi yang didakwa berhak bersumpah (H.R. Ibn Majah).

Dari Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian harus dipenuhi dan pertanggung jawabkan, apabila ada salah satu pihak yang

¹²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz II, No. 321 (Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2009), 778.

mengingkari perjanjian tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan.¹²²

Jika pekerja mengklaim bahwa garapannya rusak, klaimnya itu dapat diterima karena ia orang yang dipercaya. Posisi sama seperti dengan pelaksana dalam bagi hasil. Jika ia di klaim, ia bersumpah, dan jika terbukti khianatnya, harus dicari orang lain yang menyertainya. Jika tidak mungkin menjaganya, pemilik tanah boleh mempekerjakan orang lain untuk menggantikannya. Demikian ini pendapat Imam Syāfi'ī. sementara itu, para sahabat Malik berpendapat orang lain tidak boleh menggantikan pekerjaannya, tetapi menjaganya.

11. Menyewakan Tanah

Boleh menyewakan tanah dengan pembayaran uang atau barang. Imam Ahmad menyatakan bahwa Ulama berbeda pendapat mengenai emas dan perak. Ibnu al-Mundzir berkata, “pada umumnya, ulama sepakat dibolehkannya menyewakan tanah dengan pembayaran emas dan perak”. Demikian ini juga merupakan pendapat Sa'id ibn al-Musayyab, Urwah, al-Qasyim, Syāfi'ī, dan Hanafiyyah, Imam an-Nawawi menyatakan demikian inilah pendapat yang rajah dan diikuti.

Ini karena kedudukan barang identik dengan harga. Adapun tentang makanan, Imam Malik melarangnya secara total, baik dari hasil yang keluar dari tanah itu atau lainnya. Namun, tiga Imam mazhab lain membolehkannya berdasarkan Hadis ibn al-Dhahhak *Radhiyallahu 'anhu*;

¹²²Muhammad Nashiruddi Al bani, *al-jami' al-Shagir, Juz I*, penerjemah: Imran Rosadi dan Andi Arlin (Jakarta: Najla Press, 2004), h. 494.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَنَا بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹²³

Artinya: “bahwa Rasulullah Saw. Telah melarang bermuzāra‘ah dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan Rasulullah Saw. Bersabda itu tidak mengapa”

Dapat dipahami dari hadis di atas masih bersifat umum, mencakup makanan dan lainnya dari hasil tanah. Larangan dalam Hadis di atas berlaku bagi akad *muzāra‘ah* yang rusak yang didominasi oleh unsur yang tidak tepat diketahui, *gharar*, tindakan aniaya terhadap salah satu pihak.

12. Zakat Muzāra‘ah

Pada prinsipnya wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

13. Berakhirnya Muzāra‘ah

Muzāra‘ah berakhir karena beberapa hal berikut:

a. Pekerja melarikan diri

Pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan yang mengategorikannya transaksi yang mengikat, maka pekerja tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan awal.

¹²³Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. III, No. 1549 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turaṡ al-‘Arabi, 2010), h. 1184.

b. Pekerja tidak mampu mengerjakan

Pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya, akan tetapi pekerja tersebut mendapat upah apabila dia telah mengerjakan beberapa pekerjaan yang ia kerjakan.

c. Salah satu dari dua pihak ada yang meninggal

Berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.¹²⁴

14. Hikmah Muzāra‘ah

Perlu diketahui bahwa sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Adapula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerja sama antara mereka, dimana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luas daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

Transaksi bagi hasil kerja sama pengelolaan tanah pertanian (*muzāra‘ah*) juga mengandung unsur tolong-menolong antara dua belah

¹²⁴Yeni Salman Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2011), h. 63.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, Abdul. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Adhie, Brahmana, *Reformasi Pertanahan*. Bandung: Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2002.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.
- Antoni, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum* Cet. I. Jakarta : Dar Al-ittiba', 1999.
- Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2011.
- , *Bulugul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddi. *al-jami' al-Shagir, Juz I*. Penerjemah: Imran Rosadi dan Andi Arlin. Jakarta: Najla Press, 2004.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Ulum ad-Din* Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1986.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*. Jilid 3. Riyad : Darul Hadis Qohiroh, 2004.
- , *Fiqih Muyassar Fi Dhouil Kitab Wa Sunnah*. Riyad: Darul A'lam As-Sunnah 2009.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, dalam Kholid Al-Atthor, Bab Hikmah Muzara'ah. Cet. I. Libanon: Al-Fikri, 1994.

- Al-Thayyar, Muhammad Abdullah. Th. I dan dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan empat Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanafi, 2009.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Juz II*. Suriyah-Damsyik: Dar al-Fikr, 1984 M/1404 H.
- , *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Ahmad Musthafa al Farran Syaikh. *Tafsir Imam Syafi 'I*. Jakarta: Almahir, 2006.
- Anshary. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan aplikasinya dalam Ekonomi Islam Perbankan*. Jakarta : DIKTIS Kementrian Agama, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Kuliah Ibadah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Az-Zibari, Amir Said. *Tanya Jawab Tentang Zakat*. Jakarta: Akbar Media, 2011.
- Muhammad Az-Zuhaili. *AL-MU'TAMAD FIQIH IMAM SYAFI'I*. Depok : Gema Insani, 2018.
- Bakry Oemar. *Tafsir Rahmat cetakan Ketiga*. Jakarta: Mutiara, 1984.
- Barlinti, Yeni Salman. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2011.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Alwaah, 1989.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Cet. Kesembilan Edisi IV, 2015.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman . *Fiqh Muamalat*. Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.
- H. A. Syafii Jafri. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Pres, 2008.
- Hadi, Yasin dan Sholikul. *Fiqh Ibadah*. Kudus: DIPA STAIN Kudus, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Hamid, Abdul. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syaria*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hanafie, A. *Ushul Fiqih*. Cet. XI. Jakarta : Widjaja, 1989.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet Ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar, 1998.
- Jalaluddin, Imam Al-Mahalli, Jalaluddin, Imam As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990.
- Jawad, Mughniyah Agus. *Fiqh Imam Ja'far As-Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Durr al-Mantsûr fî al-Tafsîr bi al-Ma''tsûr*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H/2000 M.
- Kaelan M. S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta : Paradigma, 2005.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2012.
- Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Latief Rowi, Robith Shomad. *Tuntunan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah, 1987.
- Mardalis. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mardani. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- , *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet ke- 2. Jakarta: Kencana, 2013.
- M. Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Muhammad bin Idris As-Syafi'i. *Al-Umm*, Jilid 4. Riyad : Syakaratul Qudus, 2016.
- Muhammad. *Zakat Profesi Wacana pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muntaha, Ahmad. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiya*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Cet Ke-1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasib Ar-Rifa'I Muhammad. *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nasib, Muhammad. *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Nur, Sunardi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. Cet. Ke-1. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa Bainal Indhibit Wat-Tasayyub*, terj. As'ad Yasin Cet. 1. Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- , Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan cet.1*. Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Quraish, M. Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Quran*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana BhaktiWakaf, 1996.
- Rofi'i, Mohammad. *Fiqh Islam*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Said. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Damascus : Darul Fath, 2003.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia, 2009.
- Saefuddin, A.M. *Studi Nilai-nilai Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah, 1984.
- Sekretariat DSN-MUI. *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Cet. III; Jakarta : Sekretariat DSN-MUI.

- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Cet Ke-1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Solichin Abdul Wahab. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- Susiadi, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat- Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. cet I; Jogjakarta: Kencana, 2011.
- Shihab, Quraishy. *Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*. Jakarta : Departemen Agama IAIN, 1986.
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- , *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Edisi I, Cet. 4. Jakarta : Kencana, 2008.
- , *Usul Fiqh II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009.
- Syafruddin Nurdin dan Basyiruddin Usman. *Guru Professional Dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Syaikh solih bin Fauzan Al-Fauzan. *Mulakhos Fiqh*. Alamiyah, 2012.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri. *MINHAJUL MUSLIM*. Jakarta : Darul Haq, 2009.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Zaini, Harun dan Mustafa Ahmad Al-Zarqa dalam buku abbas Arfan, *KaidahKaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan*.

PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN SEJENISNYA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.
- Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012.
- PP Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 Tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

JURNAL

- Gozi, Muhamad. *Akad Wad Al Murabahah* (Studi Kasus BRI Syari'ah), Tesis Fakultas Hukum Unair. Diakses repository.unair.ac.id.
- Hosen, Muhammad Nadrattuzaman. *Implementasi Wa'd*, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Al-Qalam Vol. 31 No. 1 (Januari - Juli) 2014. Diakses Jurnal Al-Qalam.
- Indriastati, Ina. *Implementasi Fatwa DSN No. 85 Tahun 2012 Di BTPN Syariah Cabang Semarang*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Diakses ptiptd.walisongo.ac.id
- Ninik Darmini dan Destri Budi Nugraheni. *Kajian Terhadap Wa'd (Akad) dalam Transaksi Perbankan Syariah Ditinjau dari Hukum Akad di Indonesia*, Laporan Penelitian. Yogyakarta : Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2016.
- Putri, Winda Nurlaili. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)". (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018. Diakses repository.radenintan.ac.id.
- Rafiq Yunus al Mashri dengan jurnalnya *al Wa'd al Mulzim fi Muamalat al-Masarif al-Islamiyyah*, Jurnal Hukum dan Syariah Vol 11, No. 1 Tahun 2015, Fakultas Hukum dan Syariah IAIN Ambon. Diakses dari jurnal.iainambon.ac.id.
- Satria, Ase. Definisi *Implementasi Dan Teori Implementasi Oleh Para Ahli Di Dalam Sebuah Kebijakan*, dalam Jurnal Kebijakan Publik Vol.4, diakses 1 Agustus 2020.
- Solikhah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wad Jual Beli Dalam Ijarah Al Muntahiyah bi Al Tamlik* (Studi atas fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002), Tesis UIN Sunan Kalijaga tahun 2009. Diakses digilib.uin-suka.ac.id.